

Indonesia Merdeka: Meneguhkan Jati Diri Bangsa di Persimpangan Ilmu, Budaya, dan Kebijakan



Gabriella Novianty Soedjarwo

Dosen STARKI

Ada di mana Indonesia saat ini?

Pada bulan Agustus 2025, Indonesia akan memperingati delapan puluh tahun kemerdekaannya—sebuah tonggak bersejarah yang tidak hanya menandai perjalanan panjang bangsa ini dalam meraih dan mempertahankan kedaulatan, tetapi juga menjadi momen penting untuk melakukan refleksi mendalam terhadap capaian dan tantangan yang masih membentang di hadapan. Selama delapan dekade, Indonesia telah menempuh berbagai fase pembangunan, menghadapi berbagai gejolak sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang membentuk karakter serta jati diri bangsa hingga seperti saat ini.

Tiga pilar utama pembangunan bangsa; ilmu pengetahuan, budaya, dan kebijakan publik—memiliki peran yang sangat strategis. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan peradaban modern. Budaya berfungsi sebagai penyangga identitas nasional yang menjaga keutuhan dan karakter bangsa. Sementara itu, kebijakan publik menjadi instrumen vital untuk mengarahkan pembangunan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial.

Perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang menatap masa depan dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Era Revolusi Industri 4.0, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan iklim global, serta dinamika geopolitik menuntut bangsa ini untuk bersikap adaptif, inovatif, dan tangguh. Oleh karena itu, momen bersejarah ini hendaknya dijadikan sebagai kesempatan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam membangun Indonesia yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan, kaya dalam budaya, dan kokoh dalam sistem tata kelola pemerintahan.

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri kembali perjalanan bangsa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan kebijakan publik sepanjang delapan dekade kemerdekaan. Selain merefleksikan capaian yang telah diraih, tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan-

tantangan yang masih dihadapi, sekaligus menawarkan perspektif dan harapan menuju Indonesia Emas 2045, saat bangsa ini akan menapaki usia satu abad kemerdekaan.

Ilmu Pengetahuan Sebagai Jalan Menuju Bangsa Berdaya Saing

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa di era globalisasi yang ditandai dengan percepatan perubahan dan persaingan antarnegara. Sepanjang delapan puluh tahun kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai daya saing yang setara dengan negara-negara maju.

Peningkatan kapasitas pendidikan tinggi, tumbuhnya lembaga riset, serta berkembangnya ekosistem inovasi di beberapa sektor telah menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mulai bergerak menjadi produsen pengetahuan dan inovasi. Pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta peningkatan akses terhadap teknologi digital, menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat basis ilmiah dalam pembangunan nasional.

Di sektor digital, Indonesia juga telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dengan tumbuhnya ekonomi digital, industri *start-up*, serta adopsi kecerdasan buatan dan *big data* dalam berbagai sektor, mulai dari layanan publik hingga bisnis. Generasi muda Indonesia semakin terlibat dalam berbagai bidang teknologi baru. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan sangat besar dan terus berkembang.

Pencapaian ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan secara optimal. Salah satu persoalan mendasar adalah rendahnya alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan (R&D), yang masih jauh di bawah standar negara-negara maju. Hingga saat ini, investasi R&D Indonesia belum mampu melampaui angka 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan inovasi, teknologi, dan produksi pengetahuan mandiri.

Tantangan lainnya adalah lemahnya kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia industri, dan pemerintah. Keterputusan antara hasil riset dengan kebutuhan industri dan kebijakan publik menyebabkan banyak penelitian yang berakhir di atas kertas tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Padahal, di banyak negara maju, sinergi yang kuat antara sektor-sektor tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam membangun inovasi yang berdampak luas.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, pembangunan berbasis ilmu pengetahuan harus dijadikan prioritas strategis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan ilmu pengetahuan Indonesia juga harus bersandar pada prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal. Inovasi yang dikembangkan tidak boleh semata-mata mengejar efisiensi ekonomi, melainkan juga harus menjunjung tinggi etika, nilai sosial, dan pelestarian lingkungan. Hal ini penting agar transformasi ilmu pengetahuan tidak justru menciptakan ketimpangan sosial atau kerusakan ekologis, melainkan berkontribusi bagi kemajuan bangsa yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Budaya: Penjaga Identitas di Era Global

Budaya merupakan pondasi yang menopang identitas bangsa dan menjadi kekuatan lunak (*soft power*) yang tidak hanya membedakan Indonesia dari bangsa lain, tetapi juga memperkuat daya saing di panggung global. Seiring dengan perjalanan delapan puluh tahun kemerdekaan, budaya Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan strategis yang menjaga keutuhan bangsa di tengah perubahan zaman yang penuh dinamika.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah, yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan, tetapi juga kekayaan intelektual dan sosial yang menjadi identitas kolektif bangsa.

Selain warisan tradisional, budaya Indonesia juga berkembang melalui ekspresi kontemporer yang memadukan nilai-nilai lokal dengan pengaruh global. Sektor ekonomi kreatif menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menkominfo, 2023) mencatat bahwa ekonomi kreatif Indonesia berkontribusi sekitar 7,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan subsektor unggulan seperti kuliner, fesyen, dan kriya yang berbasis pada kekayaan budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya simbol identitas, tetapi juga sumber daya ekonomi yang strategis.

Arus globalisasi dan penetrasi budaya asing yang semakin masif menghadirkan tantangan yang tidak kecil bagi keberlangsungan budaya nasional. Perkembangan teknologi digital, media sosial, dan ekonomi digital mempercepat pertemuan budaya yang tidak selalu seimbang. Generasi muda Indonesia, yang hidup dalam era digital, berpotensi terlepas dari akar budayanya akibat penetrasi budaya populer global yang dominan. Hofstede dalam teorinya tentang dimensi budaya menekankan bahwa nilai-nilai budaya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sosial dan identitas kolektif; oleh karena itu, tergerusnya nilai-nilai budaya lokal dapat berimplikasi pada lemahnya solidaritas dan kohesi sosial (Hofstede, 2010).

Maka, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, upaya revitalisasi budaya menjadi sangat penting. Revitalisasi ini bukan berarti membekukan budaya dalam bentuk tradisi masa lalu, tetapi justru mendorong adaptasi kreatif agar budaya tetap relevan dan hidup di tengah perubahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Homi K. Bhabha tentang “cultural hybridity” yang menegaskan bahwa budaya selalu berada dalam proses pembentukan dan negosiasi, bukan sesuatu yang statis (Bhabha, 1994).

Pendidikan budaya sejak dini harus diperkuat dalam kurikulum pendidikan nasional agar generasi muda memahami dan menghargai akar budayanya. Pelibatan masyarakat adat, komunitas lokal, dan pelaku seni dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan budaya juga harus diperluas. Selain itu, pengembangan diplomasi budaya (*cultural diplomacy*) dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tidak hanya sebagai negara dengan kekayaan budaya, tetapi juga sebagai aktor yang mampu membangun jembatan antarbangsa melalui kekuatan lunaknya.

Pemanfaatan teknologi digital untuk pelestarian dan promosi budaya juga perlu terus dikembangkan. Digitalisasi artefak, festival budaya virtual, dan pemanfaatan media sosial untuk

kampanye budaya merupakan langkah strategis agar budaya Indonesia dapat menjangkau generasi muda dan masyarakat internasional secara lebih luas.

Budaya yang kuat bukan hanya menjadi penanda identitas, tetapi juga perekat sosial dan pendorong inovasi. Oleh karena itu, pembangunan budaya harus berjalan seiring dengan pembangunan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik, agar Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman, dan kearifan lokal.

Kebijakan Publik Sebagai Pilar Demokrasi dan Kesejahteraan

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang menentukan arah dan kualitas pembangunan suatu bangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga usia ke-80 pada Agustus 2025, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang dalam membangun sistem kebijakan publik yang mendukung demokrasi, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Pasang surut demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan politik dan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan. Peralihan dari rezim otoriter ke era reformasi sejak 1998 telah membuka ruang bagi demokratisasi yang lebih inklusif, ditandai dengan desentralisasi kekuasaan, pemilihan umum langsung, serta tumbuhnya masyarakat sipil yang lebih aktif. Menurut *The Economist Intelligence Unit*, meskipun Indonesia masuk dalam kategori “*flawed democracy*”, indeks demokrasi Indonesia tetap stabil dalam dekade terakhir, mencerminkan konsistensi dalam menjaga stabilitas politik dan partisipasi warga negara (EIU, 2023).

Namun demikian, berbagai tantangan struktural dalam kebijakan publik masih membayangi. Ketimpangan ekonomi dan sosial tetap menjadi isu yang belum tuntas. Koefisien Gini Indonesia, yang mengukur ketimpangan pendapatan, masih berkisar pada angka 0,38 pada tahun 2024, menunjukkan kesenjangan yang relatif tinggi di tingkat nasional. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik di berbagai daerah masih timpang akibat lemahnya kapasitas birokrasi dan keterbatasan fiskal di tingkat lokal. Menurut kajian World Bank, efektivitas pelayanan publik Indonesia masih tergolong moderat dan memerlukan reformasi birokrasi yang lebih mendalam (WB, 2022).

Isu krusial lainnya adalah lemahnya penerapan prinsip *evidence-based policy* dalam proses perumusan kebijakan. Banyak kebijakan yang masih berbasis pada pertimbangan politis jangka pendek, bukan pada analisis ilmiah yang mendalam atau kebutuhan masyarakat berbasis data. Hal ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak berkelanjutan dan berisiko gagal menjawab tantangan masa depan, seperti krisis iklim, transformasi digital, dan ketahanan pangan.

Selain itu, polarisasi politik, disinformasi di ruang digital, dan lemahnya literasi politik masyarakat menambah kompleksitas dalam menjaga kualitas demokrasi substantif. Norris & Inglehart dalam kajian mereka mengenai “*Cultural Backlash and Democracy*” memperingatkan bahwa demokrasi modern bukan hanya membutuhkan prosedur elektoral yang baik, tetapi juga memerlukan masyarakat yang berbudaya demokratis, menghargai perbedaan, dan mampu berpikir kritis (Norris & Inglehart, 2019). Dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan kebijakan publik harus bertransformasi menuju sistem yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkeadilan.

Sinergi Ilmu, Budaya, dan Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045

Menyongsong satu abad kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia dihadapkan pada sebuah peluang historis sekaligus tantangan strategis untuk memperkuat posisinya sebagai bangsa besar yang maju, sejahtera, berdaulat, dan berdaya saing tinggi di kancah global. Cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 menuntut sinergi yang erat dan terintegrasi antara ilmu pengetahuan, budaya, dan kebijakan publik sebagai tiga pilar utama pembangunan bangsa.

Ilmu pengetahuan menyediakan basis rasional dan inovatif untuk menghadapi kompleksitas persoalan global, mulai dari transformasi digital, perubahan iklim, hingga revolusi industri berbasis kecerdasan buatan. World Intellectual Property Organization (WIPO, 2024) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-75 dalam Indeks Inovasi Global, menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, daya saing inovasi Indonesia masih memerlukan percepatan signifikan. Untuk itu, investasi pada riset, pengembangan teknologi, dan pendidikan berbasis sains dan teknologi perlu ditingkatkan secara progresif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, ilmu pengetahuan saja tidak cukup tanpa budaya yang kuat sebagai landasan identitas, nilai, dan orientasi moral bangsa. Amartya Sen dalam karyanya *Development as Freedom* menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari indikator ekonomi atau teknologi, tetapi juga dari kebebasan budaya dan sosial yang menopang martabat manusia (Sen, 1999). Indonesia dengan kekayaan budaya lokalnya memiliki potensi luar biasa untuk melahirkan inovasi-inovasi berbasis kearifan lokal (*local wisdom-based innovation*) yang tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial.

Sementara itu, kebijakan publik menjadi jembatan penghubung antara ilmu pengetahuan dan budaya agar transformasi pembangunan dapat berjalan efektif dan inklusif. Kebijakan yang baik harus mampu mengakomodasi perkembangan sains dan teknologi sekaligus menghormati serta melindungi nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa. Pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan—baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas budaya, maupun masyarakat sipil—terlibat aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam kerangka sinergi tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang harus ditempuh.

Pertama adalah membangun ekosistem inovasi yang berbasis budaya. Indonesia perlu mendorong lahirnya ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan sumber daya lokal dan budaya sebagai basis penciptaan nilai tambah. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi kreatif, industri berbasis budaya, dan digitalisasi warisan budaya agar dapat bersaing di pasar global.

Indonesia perlu memperkuat diplomasi budaya dan *soft power*. Budaya Indonesia yang kaya dapat dijadikan instrumen diplomasi global melalui penguatan *soft power*. Seperti dikemukakan oleh Joseph Nye, *soft power* adalah kekuatan yang timbul bukan dari paksaan, tetapi dari daya tarik nilai dan budaya yang mampu membentuk preferensi negara-negara lain (Nye, 2004). Diplomasi budaya harus menjadi bagian dari strategi geopolitik Indonesia di era kompetisi antarbangsa yang semakin ketat.

Perlunya penguatan kebijakan inklusif dan berbasis bukti. Kebijakan publik masa depan harus bertransformasi menjadi lebih berbasis data dan partisipatif. Penerapan *big data analytics* dalam kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan akan membantu menciptakan keputusan yang

lebih presisi, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan literasi kebijakan di kalangan masyarakat akan memperbesar partisipasi publik dalam proses demokrasi deliberatif.

Mulai berfokus pada pembangunan berbasis keberlanjutan perlu dimulai. Visi Indonesia Emas tidak akan tercapai tanpa komitmen terhadap *sustainable development*. Kebijakan terkait energi bersih, ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan harus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem sosial maupun alam. UN *Sustainable Development Goals* (SDGs) harus terus dijadikan acuan strategis dalam merumuskan agenda nasional.

Pembangunan karakter dan identitas nasional menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pendidikan karakter berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus diperkuat sebagai upaya memperkuat identitas kebangsaan di tengah gempuran budaya global. Hal ini juga penting untuk menciptakan masyarakat yang toleran, berintegritas, dan berdaya saing secara global.

Sinergi antara ilmu pengetahuan, budaya, dan kebijakan publik bukan sekadar slogan, melainkan prasyarat fundamental agar transformasi menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat inovasi, merawat budaya, dan memperbaiki tata kelola, Indonesia dapat melangkah mantap sebagai bangsa yang tidak hanya besar dari sisi jumlah penduduk dan ekonomi, tetapi juga kuat dari sisi peradaban dan kontribusinya bagi dunia.

Langkah Baru Dimulai dari Sekarang

Memasuki usia 80 tahun kemerdekaannya, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang yang penuh dinamika, tantangan, dan pencapaian. Perjalanan ini tidak hanya merekam keberhasilan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun pondasi demokrasi, tetapi juga mencerminkan semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai krisis dan perubahan global. Ilmu pengetahuan, budaya, dan kebijakan publik merupakan tiga pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun peradaban Indonesia yang berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan. Ketiganya saling menopang dalam menciptakan masyarakat yang maju secara teknologi, kuat dalam identitas budaya, dan adil dalam sistem tata kelola. Tanpa penguatan di ketiga bidang ini, transformasi menuju Indonesia Emas 2045 berisiko terhambat oleh ketimpangan, keterbelakangan, dan kehilangan arah jati diri bangsa.

Refleksi 80 tahun kemerdekaan bukan semata-mata perayaan historis, melainkan kesempatan emas untuk memperbaharui komitmen kolektif sebagai bangsa. Masyarakat Indonesia perlu menyadari bahwa masa depan tidak akan terbentuk hanya melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis etika dan kebutuhan rakyat, pelestarian budaya yang adaptif dan inklusif, serta perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti, transparan, dan berkeadilan.

Dalam menghadapi abad kedua kemerdekaan, Indonesia perlu meneguhkan paradigma pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Pembangunan sejati adalah yang memperluas kebebasan dan martabat setiap individu, bukan sekadar peningkatan angka-angka statistik.

Sinergi yang kuat antara ilmu, budaya, dan kebijakan akan menjadi kunci agar Indonesia mampu menjadi bangsa yang bukan hanya besar secara demografis dan ekonomi, tetapi juga

dihormati karena kontribusinya terhadap perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan global. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan inovasi berkelanjutan, Indonesia memiliki semua modal untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah keniscayaan yang dapat diwujudkan bersama./ME.

Daftar Pustaka

- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.
- BPS, B. P. S. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS-Statistics Indonesia.
- EIU, T. E. I. U. (2023). *Democracy Index 2023: Frontline Democracy and Backsliding*. <https://www.eiu.com>
- Hofstede, G. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. McGraw-Hill.
- Menkominfo, K. P. dan E. K. R. I. (2023). *Laporan Tahunan Ekonomi Kreatif 2023*. Kemenparekraf.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- Nye, J. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- WB, W. B. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Managing Risks, Seizing Opportunities*. The World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
- WIPO, W. I. P. O. (2024). *Global Innovation Index 2024*. WIPO. <https://www.wipo.int>